

ABSTRAK

Mempertimbangkan tingginya permintaan atas komoditas batuan dan kompleksitas permasalahan yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka keterlibatan pemerintah menjadi sangat penting. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Dinas ESDM) merupakan lembaga pemerintah yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengadakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap usaha pertambangan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan yang dilakukan oleh Dinas ESDM, menggambarkan dan menganalisis peran Dinas ESDM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan serta mengetahui hambatan dan solusi dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengeolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.55 Tahun 2010), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pepres 55 Tahun 2022) serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi pengawasan tersebut tidak berjalan maksimal, terdapat beberapa usaha pertambangan yang tidak dapat diawasi akibat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas ESDM. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengawasan, yaitu 1) Belum dibentuknya peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pengawasan usaha pertambangan. 2) Kesulitan dalam mengatur jadwal pengawasan dan bocornya informasi mengenai jadwal pengawasan kepada pelaku usaha dan 3) Dinas ESDM mengalami penolakan dari pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan sanksi administratif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai solusi atas hambatan tersebut, yaitu: mempercepat pembentukan peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020, memperbaiki pola dan koordinasi antar instansi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pentingnya menerapkan *good mining practice*.

Kata Kunci: Pengawasan; Usaha Pertambangan; Komoditas Batuan; Dinas ESDM

ABSTRACT

Considering the high demand for rock commodities and the complexity of issues that have wide-ranging impacts on various aspects of community life, government involvement becomes crucial. The Department of Energy and Mineral Resources of Central Java Province (Dinas ESDM) is a governmental institution constitutionally empowered to conduct supervision (toezichthoudensdaad) over mining activities. The purpose of this research is to understand the regulatory framework of the supervisory function of rock commodity mining activities carried out by Dinas ESDM, to describe and analyze the role of Dinas ESDM in implementing the supervisory function over rock commodity mining activities, and to identify obstacles and solutions in carrying out this supervisory function. The research method employed is the juridical empirical method with the research specification being descriptive-analytical. Data collection methods used include interviews and literature studies, involving the gathering of primary and secondary data.

The research findings show that the regulation of supervision functions for rock commodity mining businesses is based on Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 3 of 2020), Government Regulation Number 55 of 2010 concerning the Development and Supervision of Mineral and Coal Mining Business Management (GR No. 55 of 2010), Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Business Licensing in the Field of Mineral and Coal Mining (Presidential Regulation 55 of 2022), and various other implementing regulations. The implementation of this supervision is not optimal, as there are several mining businesses that cannot be monitored due to limitations in terms of human resources, budget, facilities, and infrastructure possessed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). Several obstacles hinder effective supervision, namely: 1) The absence of implementing regulations for Law No. 3 of 2020 specifically addressing mining business oversight. 2) Difficulties in scheduling supervision and leakage of information about supervision schedules to business operators, and 3) The Ministry of ESDM encounters resistance from business operators and the community in imposing administrative sanctions. Efforts that the Government can undertake as solutions to these obstacles are: expediting the formation of implementing regulations for Law No. 3 of 2020, improving patterns and coordination among institutions, and conducting awareness campaigns among the public and business operators about the importance of implementing good mining practices.

Keywords: Controlling, Mining Industry, Rock Commodities, Dinas ESDM